

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi kondisi perekonomian negara lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di era globalisasi ini, dunia menjadi semakin sempit dan setiap negara terkoneksi satu sama lain, sehingga menimbulkan adanya saling ketergantungan. Sejak tahun 2011 kondisi perekonomian global mengalami perlambatan. Menurut Bank Indonesia perlambatan ekonomi global salah satunya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi China.<sup>1</sup> Sebagai salah satu negara yang tergabung di dalam *ASEAN plus three* dan ACFTA, hubungan antara China dan ASEAN menjadi lebih erat terutama dibidang ekonomi. Sehingga lemahnya kondisi perekonomian di China juga berdampak pada melemahnya kondisi perekonomian di ASEAN.

Lemahnya kondisi perekonomian di ASEAN tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan pemerintah, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan ketika pendapatan rendah, maka kemampuan masyarakat di dalam membayar pajak juga rendah.<sup>2</sup> Rendahnya penerimaan pajak tercermin dari rendahnya rasio pajak di negara-negara ASEAN tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia rasio pajak di negara-negara ASEAN selalu berada di bawah 20% pada tahun 2010-2015 termasuk bagi

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, "Laporan Perekonomian Global Indonesia", 2016, [http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/3\\_Bagian\\_I.pdf](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/3_Bagian_I.pdf), P. 3, Diakses Pada 1 Maret 2017.

<sup>2</sup> Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2005), P. 177.

negara-negara *emerging market* seperti, Indonesia, Malaysia Thailand, dan Filipina, bahkan untuk negara maju seperti Singapura juga mengalami hal yang sama. Menurut Tony Prasetyantono sebagai negara *emerging market* dengan rasio pajak yang masih berada di bawah 20 persen dinilai masih terlalu kecil.<sup>3</sup> Karena idealnya bagi negara *emerging market*, rasio pajak seharusnya mencapai 20 persen atau setidaknya 17 persen. Berikut ini merupakan rasio pajak dari negara-negara yang berada di wilayah ASEAN.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Pajak Negara-Negara ASEAN (dalam Persen)**

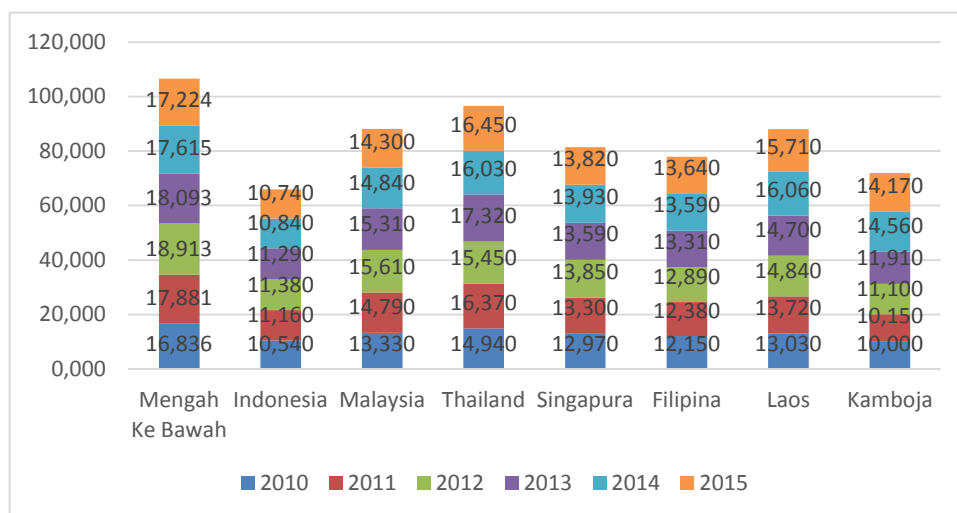
| Negara           | Tahun |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| <b>Indonesia</b> | 10.54 | 11.16 | 11.38 | 11.29 | 10.84 | 10.74 |
| <b>Malaysia</b>  | 13.33 | 14.79 | 15.61 | 15.31 | 14.84 | 14.30 |
| <b>Thailand</b>  | 14.94 | 16.37 | 15.45 | 17.32 | 16.03 | 16.45 |
| <b>Singapura</b> | 12.97 | 13.30 | 13.85 | 13.59 | 13.93 | 13.82 |
| <b>Filipina</b>  | 12.15 | 12.38 | 12.89 | 13.31 | 13.59 | 13.64 |
| <b>Laos</b>      | 13.03 | 13.72 | 14.84 | 14.70 | 16.06 | 15.71 |
| <b>Kamboja</b>   | 10.00 | 10.15 | 11.10 | 11.91 | 14.56 | 14.17 |

Sumber: Bank Dunia

Selain itu di tahun yang sama, rasio pajak di negara-negara tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah. Pada tahun 2010 nilai rata-rata rasio pajak di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah adalah 16.83%. Sedangkan rata-rata rasio pajak di tujuh negara ASEAN tersebut adalah

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, "Tony Prasetyantono: Indonesia Harus Tingkatkan Tax Ratio", 2013, <http://www.pajak.go.id/content/tony-prasetyantono-indonesia-harus-tingkatkan-tax-ratio>. Diakses Pada 8 Maret 2017.

sebesar 12,42% dan tidak ada satupun negara dengan rasio pajak lebih dari 16%. Pada tahun 2011, rata-rata rasio pajak negara berpendapatan menengah ke bawah adalah sebesar 17,88%. Sedangkan rata-rata rasio pajak di tujuh negara ASEAN tersebut adalah sebesar 13,12% dan tidak ada satupun negara dengan rasio pajak di atas rata-rata negara berpendapatan menengah ke bawah. Kondisi seperti ini terus berlanjut hingga tahun 2015. Dimana rasio pajak di tujuh negara ASEAN tersebut selalu berada di bawah rata-rata rasio pajak negara berpendapatan menengah ke bawah. Bahkan untuk negara Malaysia dan Thailand yang merupakan negara berpendapatan menengah ke atas, dan juga Singapura yang merupakan negara berpendapatan tinggi juga mengalami hal yang serupa. Berikut ini adalah perbandingan nilai rata-rata rasio pajak di negara berpendapatan menengah ke bawah dengan rasio pajak di tujuh negara ASEAN tahun 2010-2015.



Sumber: Bank Dunia (Data Diolah Peneliti)

**Gambar 1.1 Perbandingan Rasio Pajak Rata-Rata Negara Menengah ke Bawah dengan Rasio Pajak Tujuh Negara ASEAN (dalam Persen)**

Rasio pajak yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah di masing-masing negara kurang optimal di dalam memungut penerimaan pajak. Karena menurut Justinus rasio pajak adalah ukuran untuk menilai kemampuan pemerintah dalam memungut pajak.<sup>4</sup> Rasio pajak yang rendah, tentunya menjadi perhatian tersendiri mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak tentunya menjadi prioritas utama sebagai sumber pendanaan kegiatan pemerintahan. Maka dari itu, penerimaan pajak yang kurang optimal dikhawatirkan akan berdampak negatif pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sehingga program-program yang ingin dicapai oleh pemerintah khususnya dibidang ekonomi tidak dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia, sumber utama penerimaan negara dari tujuh negara ASEAN tersebut adalah pajak. Dari tahun 2010-2015 secara umum penerimaan pajak mendominasi penerimaan negara lainnya (penerimaan bukan pajak dan hibah), yaitu dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap total penerimaan negara. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak sangatlah penting dalam rangka mendanai kegiatan pemerintahan khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sumber utama penerimaan tersebut, harus segera ditanggulangi. Berikut ini adalah data kontribusi

---

<sup>4</sup> Justinus Prastowo dan Setyo Budiantoro, "Rasio Pajak Rendah, Utang Makin Menumpuk", Prakara Policy Review, 2012, [http://theprakarsa.org/new/ck\\_upload/files/Prakarsa%20Policy\\_Maret\\_10.pdf](http://theprakarsa.org/new/ck_upload/files/Prakarsa%20Policy_Maret_10.pdf), Diakses Pada 18 Juli 2017.

penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara di negara-negara terbesar ASEAN.

**Tabel 1.2**

**Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Total Penerimaan Negara di Negara-Negara ASEAN 2010-2015 (dalam Persen)**

| Negara           | Tahun |      |      |      |      |      |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|
|                  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| <b>Indonesia</b> | 72.7  | 72.2 | 73.3 | 74.9 | 73.9 | 82.3 |
| <b>Malaysia</b>  | 68.6  | 72.7 | 72.9 | 73.1 | 74.4 | 75.5 |
| <b>Thailand</b>  | 85.0  | 86.9 | 85.9 | 87.6 | 86.4 | 84.3 |
| <b>Singapura</b> | 76.2  | 77.0 | 77.7 | 77.0 | 75.2 | 73.0 |
| <b>Filipina</b>  | 90.5  | 88.4 | 89.1 | 89.6 | 90.2 | 88.7 |
| <b>Kamboja</b>   | 60.6  | 67.2 | 60.3 | 67.5 | 76.4 | 78.8 |
| <b>Laos</b>      | 63.4  | 66.2 | 65.4 | 65.6 | 66.8 | 66.4 |

Sumber: Bank Dunia (Data Diolah Peneliti Tahun 2017)

Permasalahan penerimaan pajak yang dialami oleh negara-negara ASEAN di atas tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dari masing-masing negara. Mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam rangka mendanai kegiatan pemerintahannya. Sehingga apabila penerimaan pajak dapat terkoleksi secara optimal, maka hal tersebut akan berdampak positif bagi keberlangsungan fungsi dan peran pemerintah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Richard Musgrave bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.<sup>5</sup> Fungsi alokasi ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjamin penyediaan barang dan jasa di suatu wilayah dengan jumlah

---

<sup>5</sup> Richard A Musgrave. dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (New York; Mc Graw Hill Company, 1939), P. 107

yang mencukupi, baik itu melalui pasar maupun disediakan secara langsung oleh pemerintah. Fungsi distribusi ditunjukkan dengan adanya pemerataan kekayaan nasional agar tidak hanya dapat dinikmati oleh golongan ekonomi menengah ke atas, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Fungsi stabilisasi ditunjukkan dengan upaya menstabilkan harga-harga yang dapat ditempuh melalui kebijakan fiskal dan moneter. Melalui kebijakan moneter, dapat dilaksanakan dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Sedangkan melalui kebijakan fiskal, dapat dilaksanakan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.

Fungsi dan peran pemerintah dalam perekonomian dapat terlaksana dengan baik apabila ketersediaan dana yang dibutuhkan tercukupi. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan adanya optimalisasi penerimaan pajak guna menunjang kegiatan pemerintahan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak perlu dilakukan perencanaan dan penyusunan model penerimaan pajak dengan melibatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Banyak hasil studi yang menunjukkan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Abhijit Sen Gupta yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti PDB perkapita, tingkat keterbukaan ekonomi, dan bantuan luar negeri secara signifikan mampu mempengaruhi kinerja penerimaan pajak.<sup>6</sup> Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti

---

<sup>6</sup> Abhijit Sen Gupta, "Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries", ResearchGate: IMF Working Paper, 2007, Vol. 07, No. 184. P. 11

stabilitas politik suatu negara, korupsi, dan pangsa dari pajak langsung dan tidak langsung.

Menurut Immervoll inflasi sangatlah penting untuk menstimulus peningkatan penerimaan pajak yang mengalami kelambanan dalam pengkoleksian pajak.<sup>7</sup> Pendapat tersebut diperkuat Doris Prammer dan Lukas Reiss yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa selama pegenaan pajak dan iuran jaminan sosial dikenakan secara proporsional atas dasar harga berlaku, penerimaan pajak akan searah dengan inflasi.<sup>8</sup> Selain itu mereka juga menambahkan, bahwa dalam pajak progresif peningkatan penerimaan pajak akan lebih besar dari inflasi. Ini berarti penerimaan pajak mengalami peningkatan berkat inflasi. Apabila pajak yang diberlakukan pajak nominal, justru inflasi akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Workineh Aynew dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa menjelaskan bahwa dalam jangka panjang PDB riil per kapita, bantuan luar negeri, dan kontribusi sektor industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.<sup>9</sup> Sedangkan inflasi memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dalam jangka pendek PDB riil per kapita memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan kontribusi sektor industri tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu, literatur juga menjelaskan

---

<sup>7</sup> Herwig Immervoll, "Falling Up the Stairs: The Effects Of "Bracket Creep" On Household Incomes, Review of Income and Wealth", 2005, P. 372

<sup>8</sup> Doris Prammer, Lukas Reiss, *Impact of Inflation on Fiscal Aggregates in Austria*, JEL Classification: E62, H60, 2015, Vol.1, No.51, P. 28

<sup>9</sup> Workineh Aynew, "Determinants of Tax Revenue in Ethiopia (Johansen Co-Integration)", Pak Publishing Group: International Journal of Business, Economics and Management, 2016, Vol.6, No.3, P. 69

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Menurut Nurcholis pertumbuhan PDB dapat meningkatkan akslerasi penerimaan pajak, dikarenakan adanya peningkatan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) yang disebabkan oleh pertumbuhan PDB itu sendiri.<sup>10</sup> Sehingga dapat dikatakan perumbuhan PDB memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris di atas, maka analisis variabel-variabel ekonomi makro yang dinilai berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak perlu dilakukan. Variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk merancang model pengoptimalan penerimaan pajak. Apabila penerimaan pajak dapat dicapai secara optimal, maka belanja pemerintah juga dapat berjalan dengan baik dan proporsional. Sehingga, pemerintah dapat menjalankan perannya secara optimal dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan alokasi yang efisien dan berkeadilan.

Untuk itu, penyusunan model penerimaan pajak sangatlah diperlukan mengingat pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara. Penyusunan dan model perencanaan penerimaan pajak perlu dilakukan dengan melibatkan faktor-faktor yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor fundamental ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, inflasi, ekspor, impor, dan lain-lain. Maka dalam hal ini, peneiliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, kontribusi

---

<sup>10</sup>Nurcholis Hanif, *Op.cit*, P. 177.



sektor industri, tingkat inflasi, dan tingkat keterbukaan ekonomi terhadap penerimaan pajak di tujuh negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa rendahnya penerimaan pajak di negara-negara ASEAN dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Rendahnya pendapatan per kapita di negara-negara ASEAN.
2. Rendahnya Tingkat Keterbukaan ekonomi di negara-negara ASEAN.
3. Tingginya tingkat inflasi di negara-negara ASEAN.
4. Rendahnya kontribusi sektor industry terhadap pembentukan PDB di negara-negara ASEAN.
5. Tingginya Tingkat Korupsi di negara-negara ASEAN.
6. Rendahnya bantuan finansial dari luar negeri ke negara-negara ASEAN.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penerimaan pajak merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi. Berhubung adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain: dana dan waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada variabel-variabel yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak berdasarkan hasil studi dan literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah: Pendapatan per kapita, kontribusi sektor industri, tingkat inflasi, dan tingkat keterbukaan ekonomi.

Untuk itu dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis “Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Kontribusi Sektor Industri, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Keterbukaan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Tujuh Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos).

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang ada, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak di tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos)?
2. Apakah terdapat pengaruh kontribusi sektor industri terhadap penerimaan pajak di tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos)?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak di tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos)?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat keterbukaan ekonomi terhadap penerimaan pajak di tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos)?
5. Apakah terdapat pengaruh pendapatan per kapita, kontribusi sektor industri, tingkat inflasi, dan tingkat keterbukaan ekonomi di tujuh negara

ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos)?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru mengenai masalah penerimaan pajak dan variable-variabel yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak di tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos).

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan manfaat bagi beberapa pihak, yakni sebagai berikut:

###### **a. Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan, serta mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi penerimaan pajak di tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos).

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan di dalam menyusun model perencanaan penerimaan pajak, dengan melibatkan faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi penerimaan pajak di tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos). Dengan begitu, juga diharapkan agar penerimaan pajak yang terkoleksi dapat optimal, sehingga realisasi penerimaan pajak pun dapat mencapai target yang ditetapkan di masing-masing negara.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan baru bagi masyarakat mengenai masalah perpajakan, khususnya yang terjadi di tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Laos). Dengan begitu, juga diharapkan adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk lebih tertib di dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.